



**BERHENTI
MENGAYOMI
KORUPSI**

Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020

Wana Alamsyah
Peneliti ICW

www.antikorupsi.org



Latar Belakang

Corruption Perception Index

2019

Peringkat

40

Skor

85

2020

Peringkat

37

Skor

102

Global Corruption Barometer

2017

Persentase

64

2020

Persentase

65

Rule Of Law Index

2019

Peringkat

97

Skor

0,38

2020

Peringkat

92

Skor

0,39



Latar Belakang

- Institusi penegak hukum belum transparan dan akuntabel dalam menyampaikan informasi mengenai proses penyidikan
- Upaya masyarakat dalam memantau kinerja penegak hukum dalam aspek penanganan perkara.



Latar Belakang



Kasus



Rp juta/kasus



Kasus



Rp juta/kasus



Kasus



Rp juta/kasus

Nasional

25

298,7

50

158,7

120

244,5

Provinsi

2-47

182-1.300

1

129,8

NA

Kab/Kota

1-75

6,4-543,2

1

129,8



Total anggaran penyidikan yang dikelola oleh institusi penegak hukum

Rp381,6 miliar

Sumber: Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kepolisian, Kejaksaan, KPK Tahun 2020



Tujuan

- Pemetaan terhadap kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas data penanganan kasus korupsi pada institusi penegak hukum



Metode

- Sumber informasi berasal dari kanal institusi penegak hukum dan/atau media.
- Periode pemantauan: 1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
- Penilaian kinerja penindakan berbasis DIPA TA 2020
- Analisis deskriptif



*Target penindakan kasus korupsi oleh Institusi
Penegak Hukum selama tahun 2020*

2.225 kasus korupsi



Penilaian Kinerja Penindakan Kasus Korupsi

$$\frac{\text{Penindakan kasus yang terpantau}}{\text{Target penindakan kasus}} \times 100\% = \% \text{ kasus yang ditangani}$$

N	% Kasus yang ditangani	Peringkat	Keterangan
1	81-100	A	Sangat baik
2	61-80	B	Baik
3	41-80	C	Cukup
4	21-40	D	Buruk
5	0-20	E	Sangat buruk

Persentase dihitung berdasarkan kasus korupsi yang terpantau oleh ICW dan dibandingkan dengan target penindakan kasus korupsi selama tahun 2020.



Temuan Umum

Kasus



444 Kasus

Tersangka



875 Tersangka

Kerugian Negara



Rp18,6 Triliun

Suap



Rp86,5 Miliar

Pungutan Liar



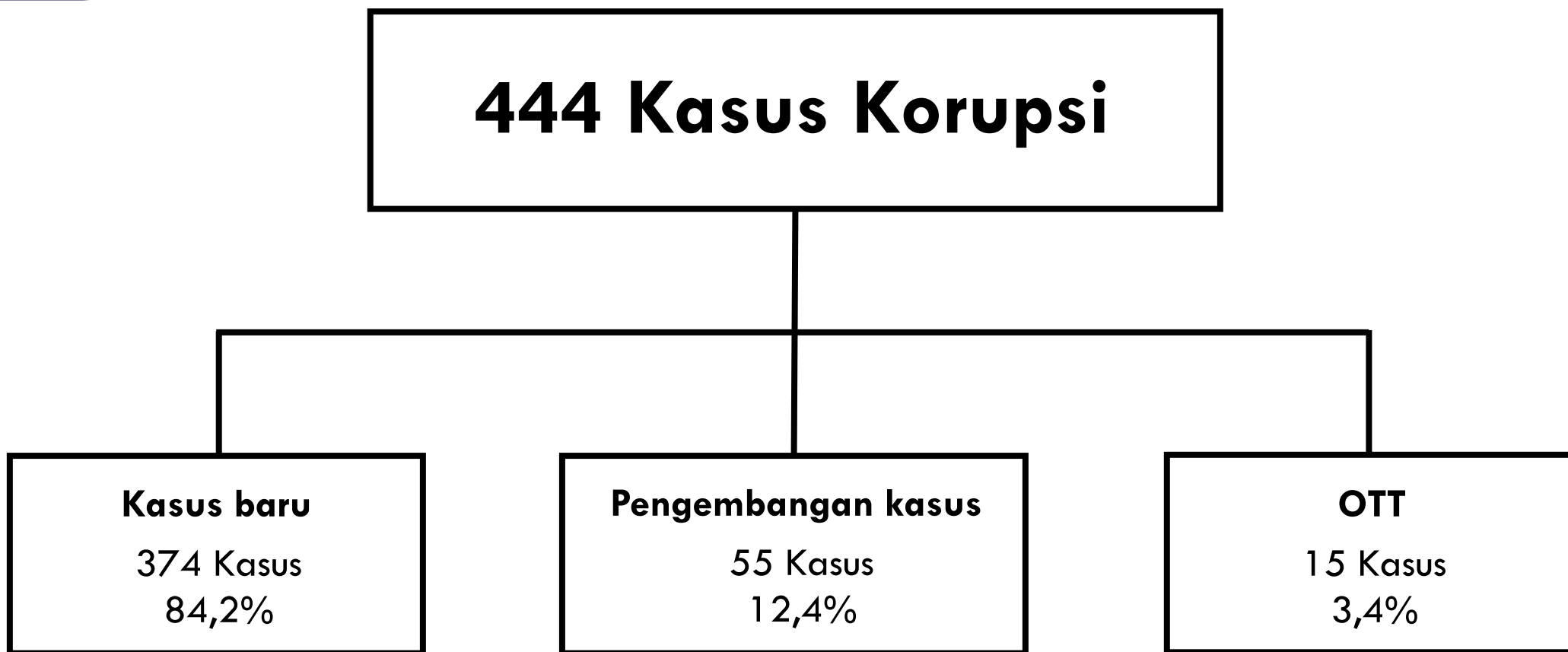
Rp5,2 Miliar



Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Institusi Penegak Hukum sepanjang tahun 2020 hanya mencapai 20 persen dan berada pada peringkat:

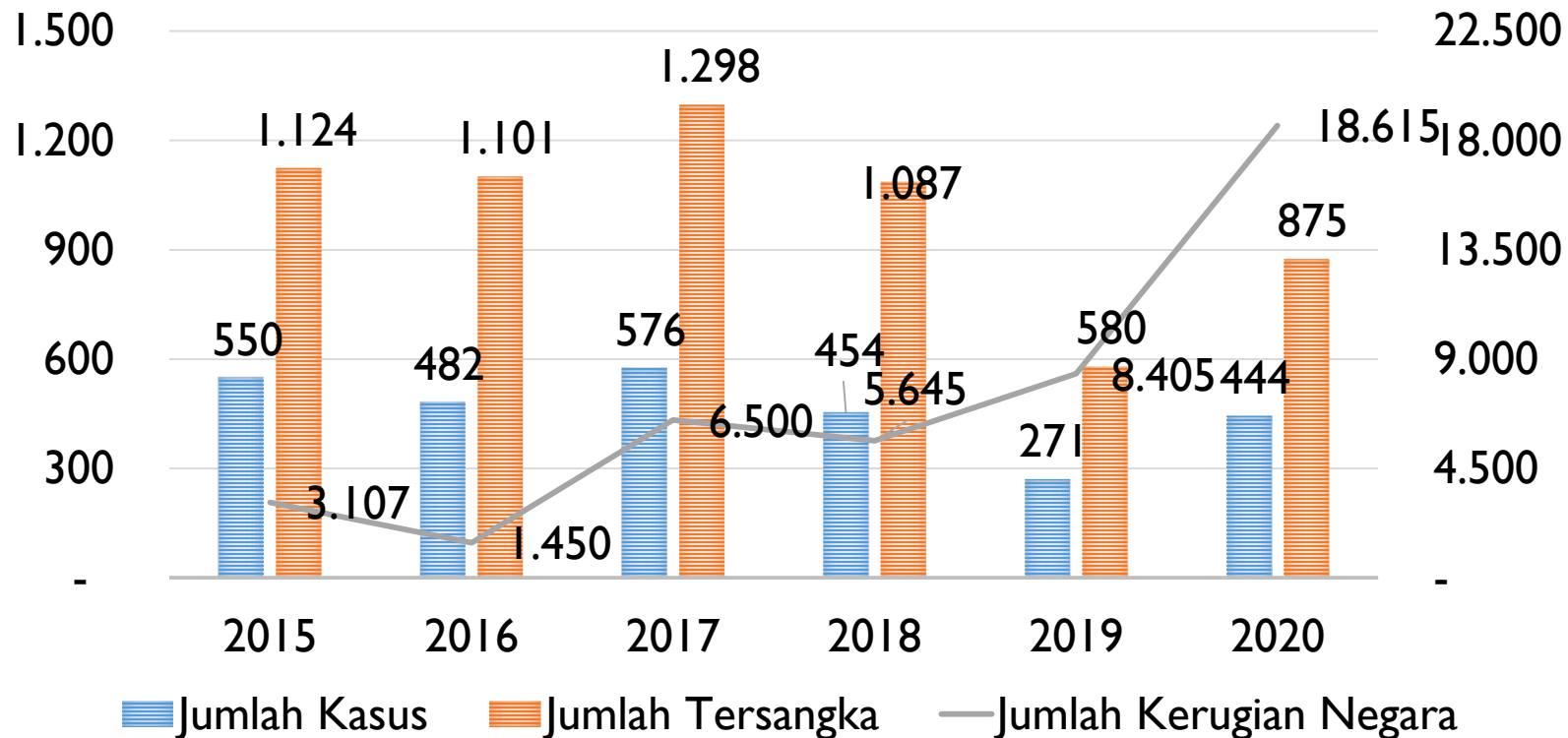
E

Temuan Umum





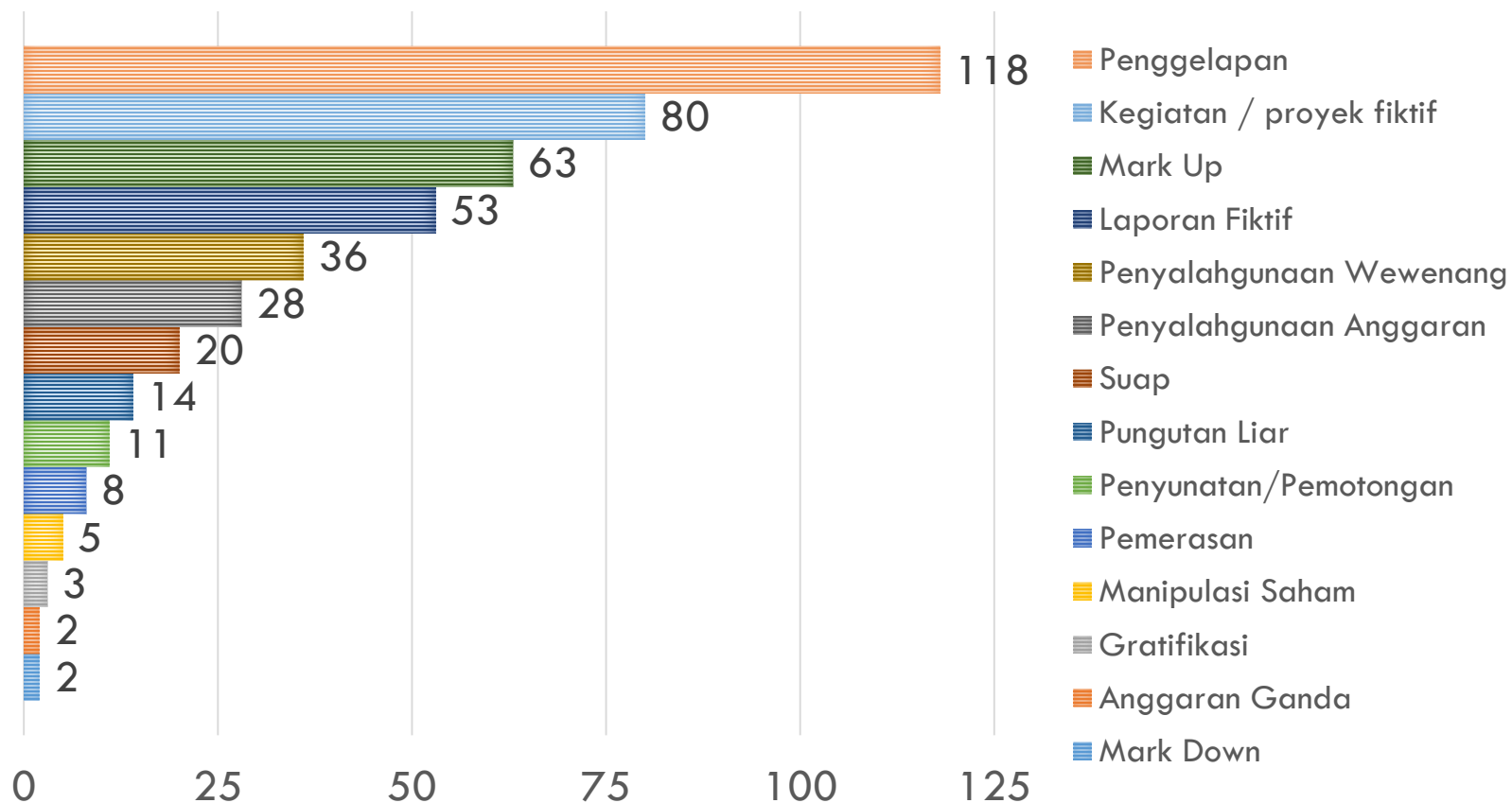
Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2015-2020



- Penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum secara tren cenderung menurun sejak tahun 2015 hingga tahun 2020.
- Sedangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi, trennya cenderung meningkat.
- Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah setiap tahun semakin lemah dari segi pengawasan.



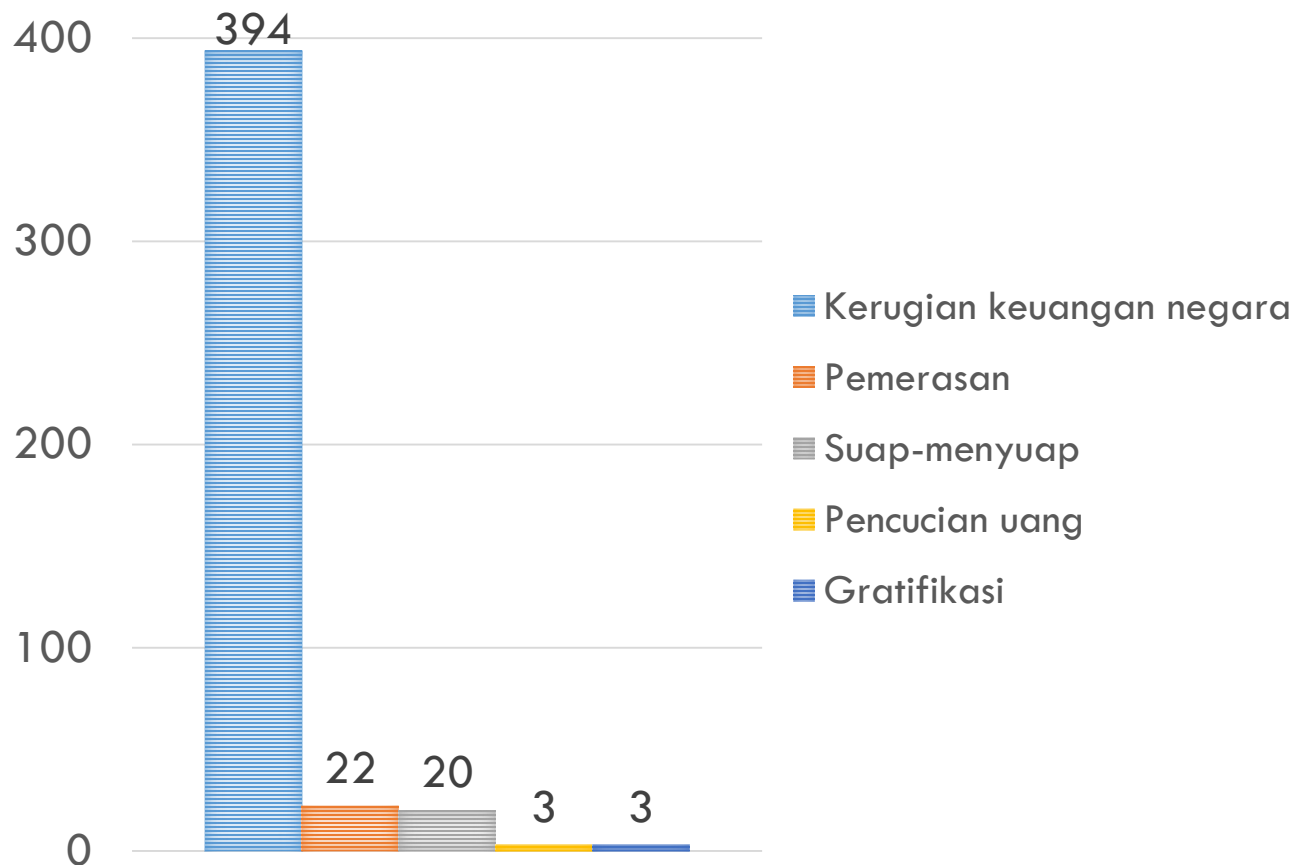
Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2020



- Penggelapan merupakan modus yang paling sering digunakan oleh pelaku korupsi.
- Modus lainnya yang sering digunakan adalah kegiatan/proyek fiktif, mark up, dan laporan fiktif.
- Ketiga modus tersebut seringkali ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa.
- Terdapat fenomena baru yaitu korupsi dengan modus memanipulasi saham.

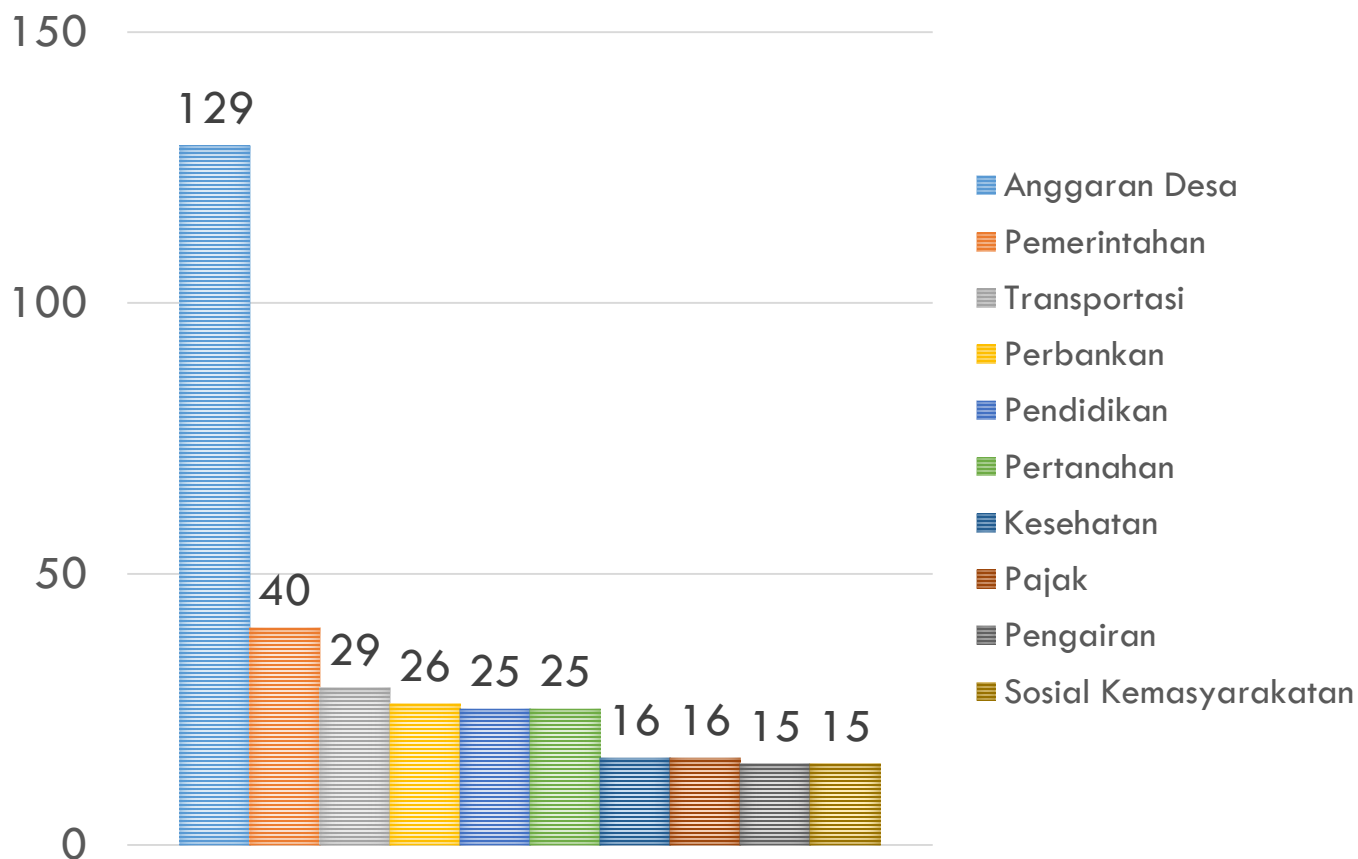


Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Pengenaan Pasal Tahun 2020



- Institusi penegak hukum selalu menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 atau jenis korupsi kerugian keuangan negara dalam mengenakan pidana terhadap pelaku korupsi.
- Institusi penegak hukum tidak memiliki visi dalam upaya untuk merampas aset pelaku korupsi. Sebab dari total kasus yang masuk dalam tahap penyidikan, hanya 3 (tiga) kasus yang dikenakan pencucian uang.
- Hal ini menunjukkan bahwa kritik Presiden Jokowi kepada institusi penegak hukum mengenai pentingnya kerugian negara yang diselamatkan hanya *gimmick*. Sebab, secara faktual pengenaan pasal pencucian uang tidak signifikan. Sementara, RUU Perampasan Aset tidak masuk ke dalam Prolegnas Prioritas.

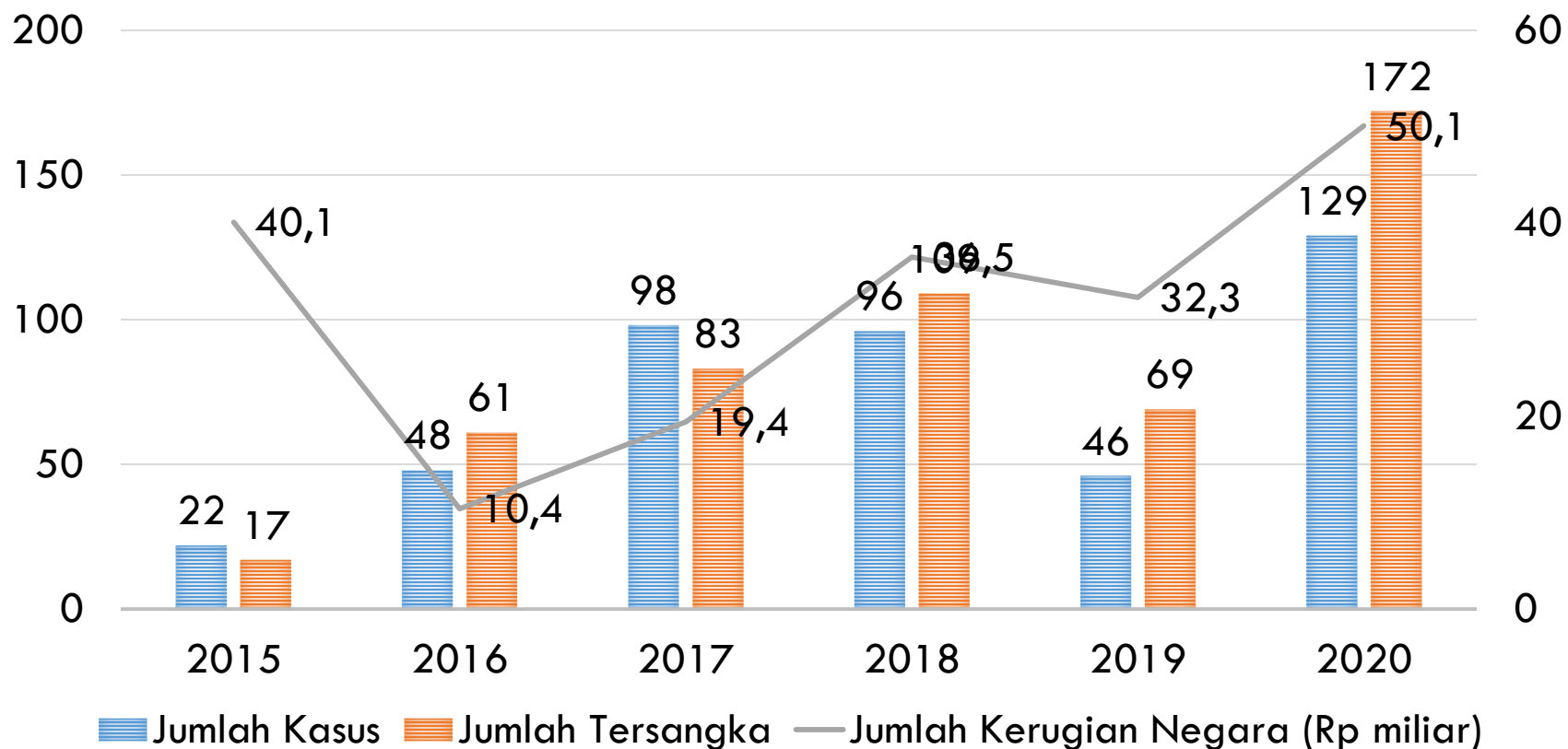
Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Tahun 2020 (Top 10)



- Institusi penegak hukum paling sering menindak kasus korupsi sektor anggaran desa pada tahun 2020.
- Sektor layanan publik juga menjadi wilayah yang paling rentan untuk dikorupsi, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanahan.
- Dari 16 kasus korupsi di sektor kesehatan, penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi anggaran Covid-19 hanya 4 (empat) kasus.



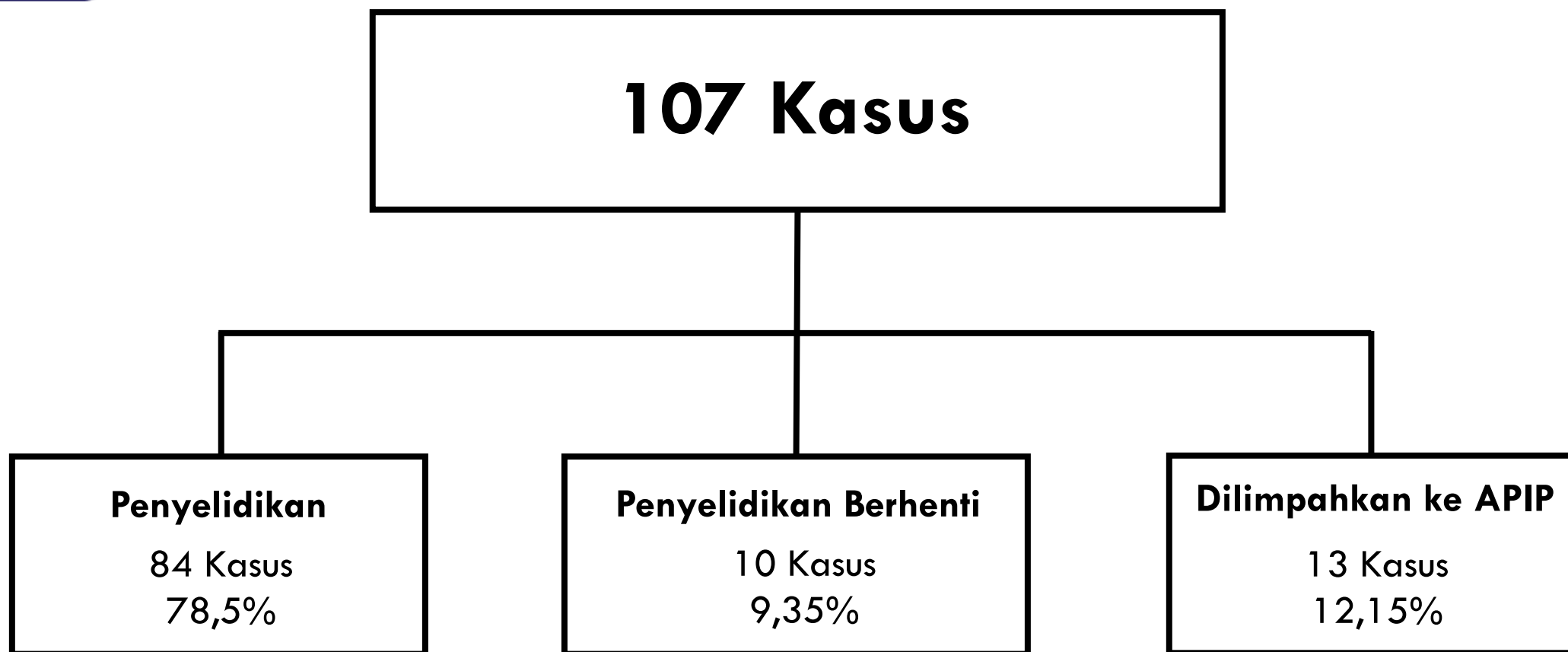
Tren Penindakan Kasus Korupsi Sektor Anggaran Desa 2015-2020



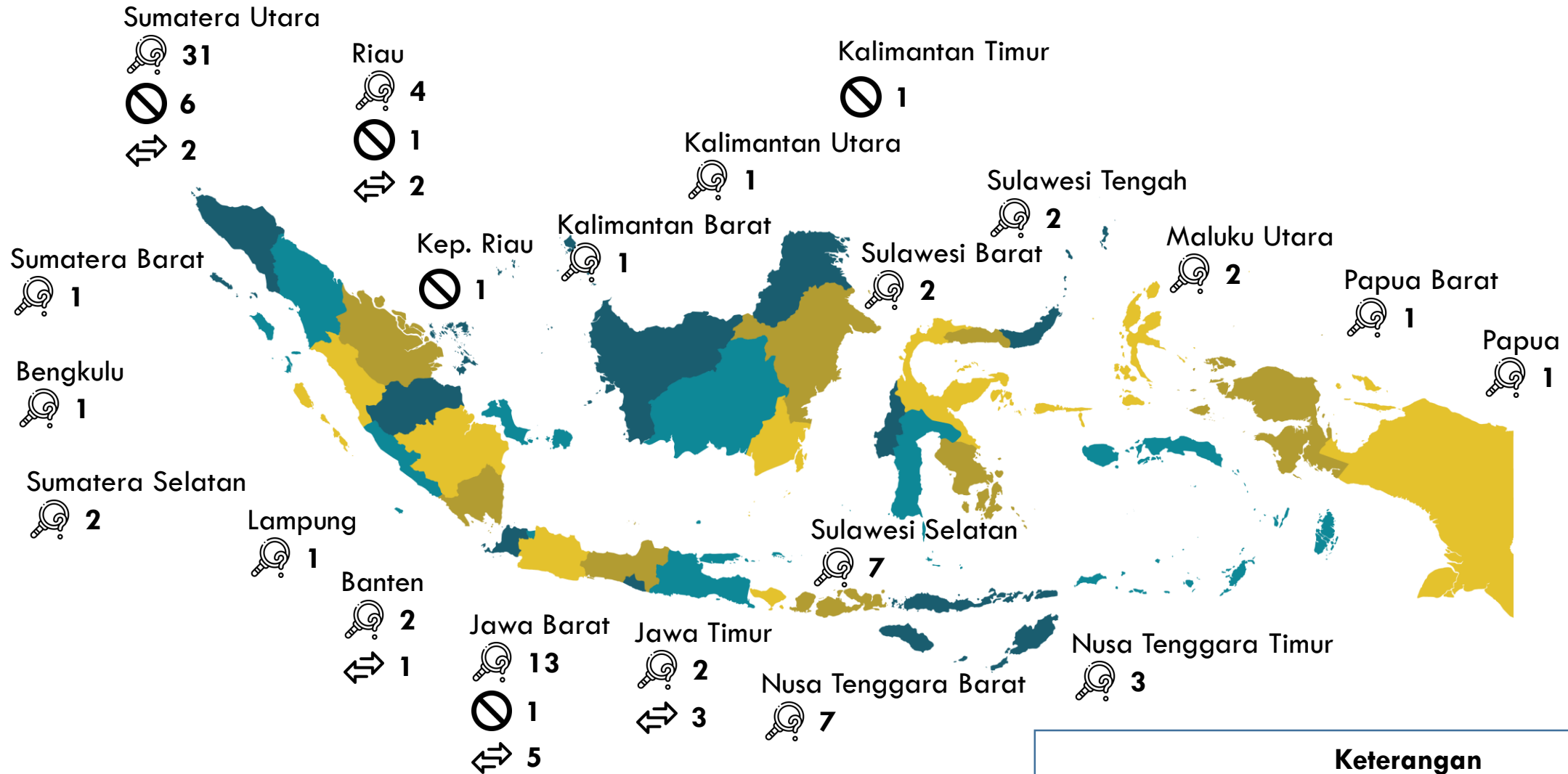


*Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim
Polri mencatat ada sebanyak **107 kasus**
penyelewengan dana bantuan sosial untuk
Covid-19 yang tersebar di 21 Polda.*


Penyelewengan Dana Covid-19





Penyelewengan Dana Bansos Covid-19



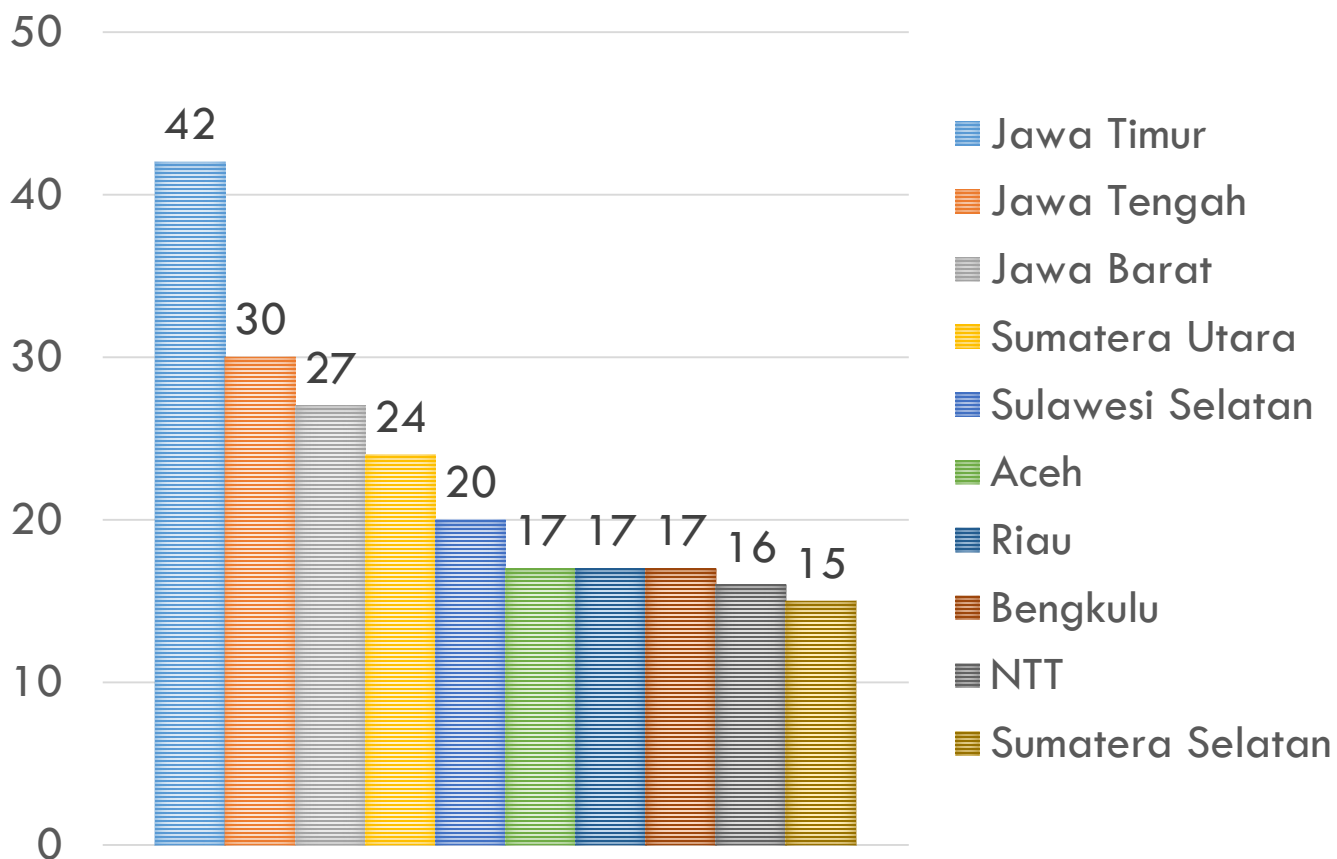
Keterangan

 Penyelidikan

 Penyelidikan Berhenti

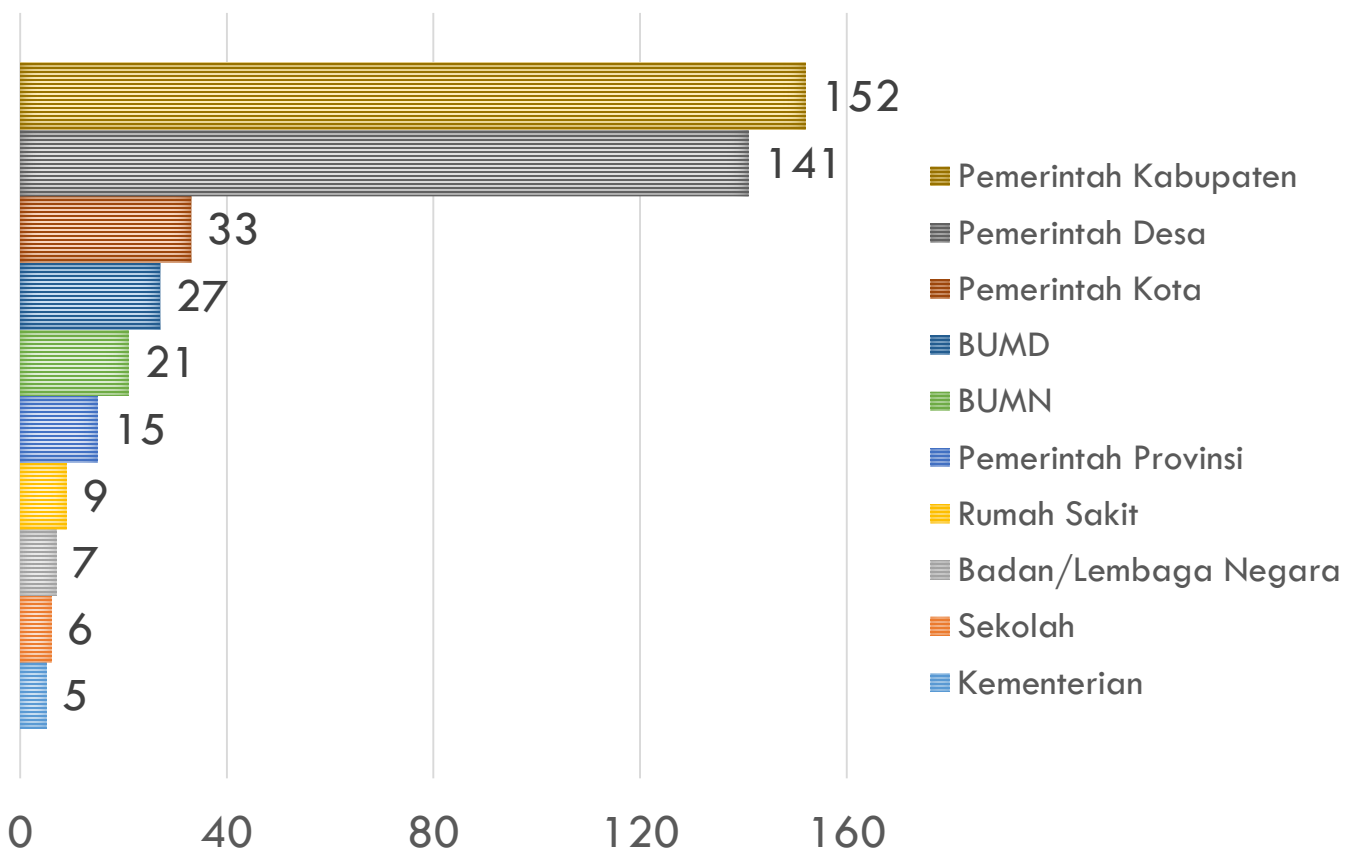
 Dilimpahkan ke APIP

Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 (Top 10)



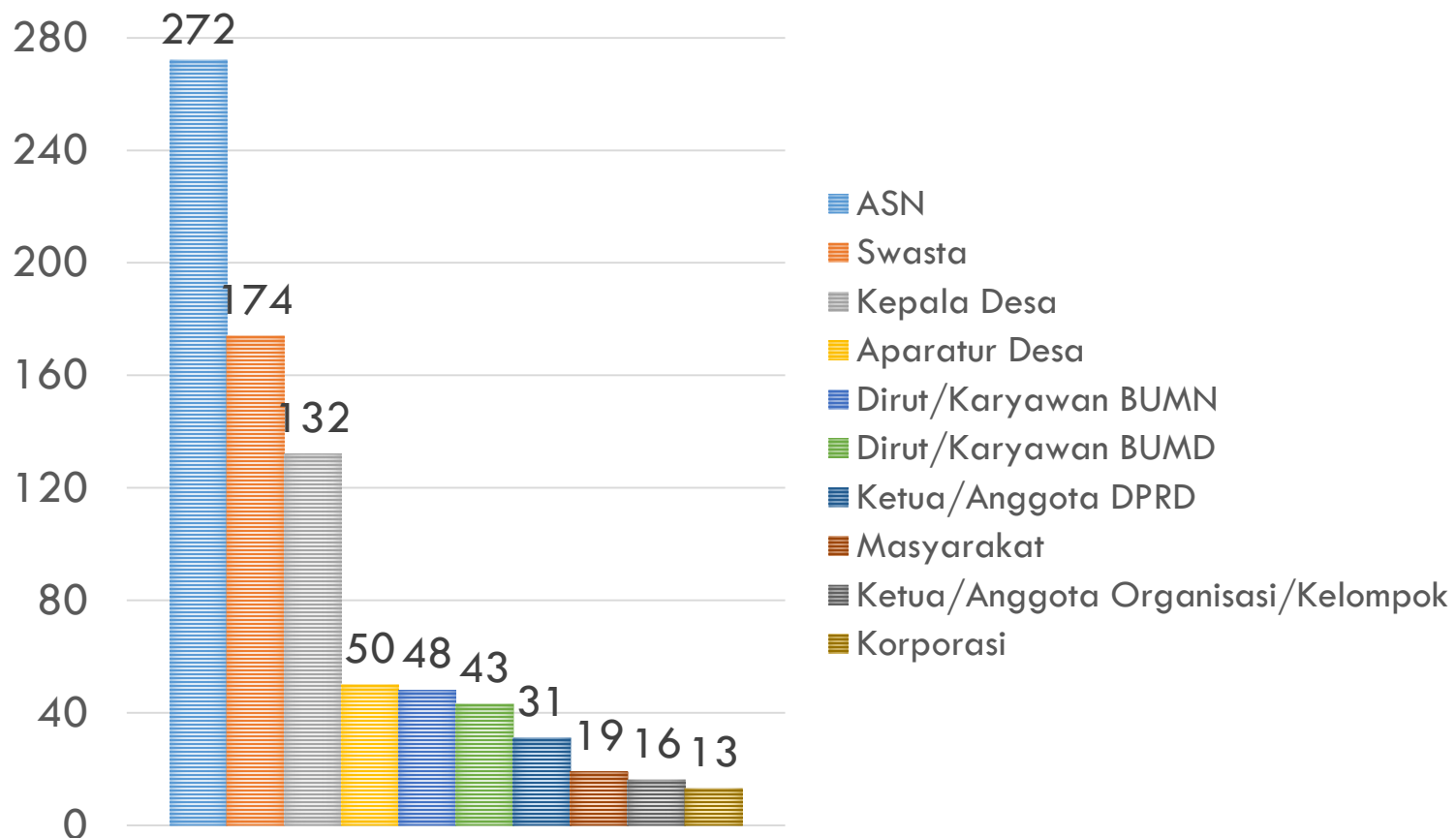
- Informasi mengenai penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum paling banyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur.
- Banyaknya kasus yang disidik tidak menjamin bahwa target penanganan kasus korupsi terealisasi.
- Di Provinsi Jawa Timur terdapat 79 kantor Kepolisian dan Kejaksaan dengan target sebanyak 340 kasus. Sayangnya penindakan kasus korupsi yang berhasil ditemukan hanya 42 kasus. Artinya kinerja penindakan kasus korupsi pada institusi penegak hukum di Provinsi Jawa Timur sangat buruk.
- Pada situs resmi institusi penegak hukum di Provinsi Jawa Timur pun tidak ditemukan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga Tahun 2020 (Top 10)



- Kasus korupsi paling banyak terjadi di tingkat daerah, baik pada level Pemerintah Daerah ataupun Perusahaan Daerah.
- Kasus korupsi di tingkat Pemerintah Desa menjadi fenomena yang telah muncul sejak adanya anggaran desa.
- Terdapat sejumlah perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat terjerat kasus korupsi.

Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor Tahun 2020 (Top 10)

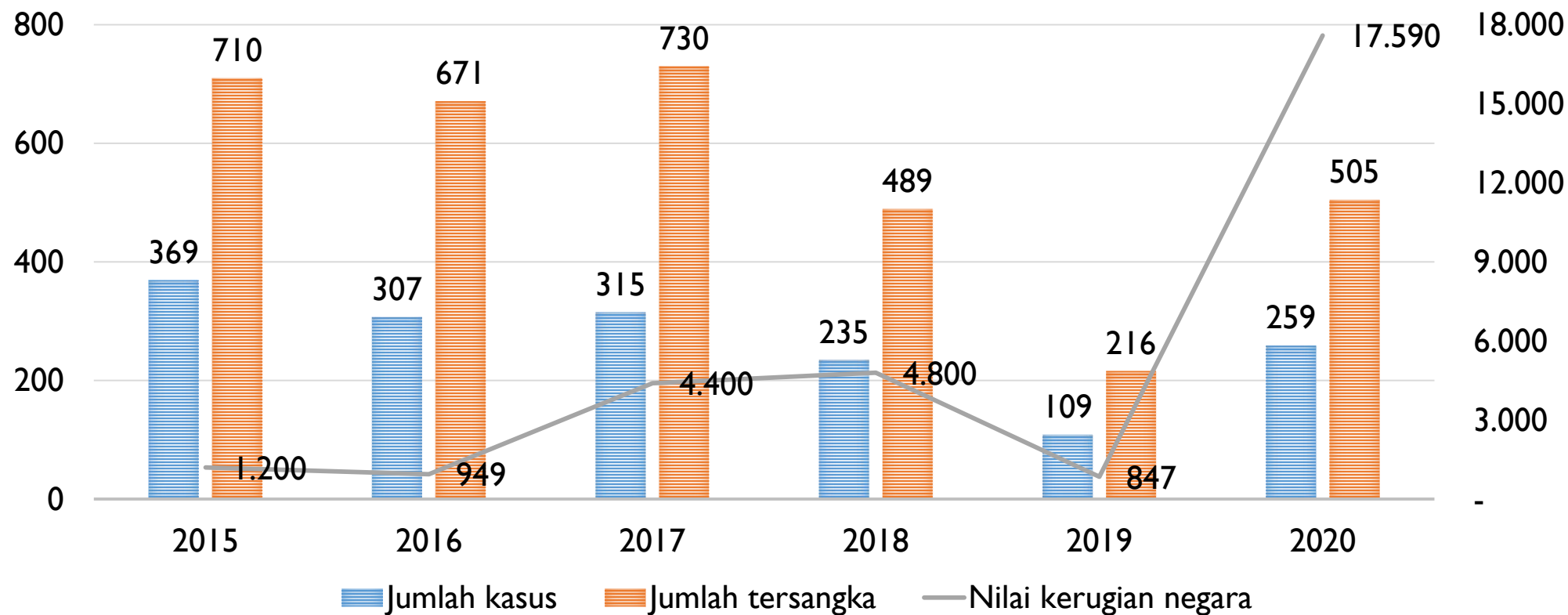


- Aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi adalah ASN, Swasta dan Kepala Desa.
- Berdasarkan hasil pantauan, kasus korupsi yang melibatkan unsur ASN dan swasta terjadi pada saat proses pengadaan barang/jasa.
- Sementara itu, Kepala Desa merupakan aktor yang paling banyak ditangkap akibat melakukan penggelapan anggaran desa.
- Institusi penegak hukum telah menetapkan sebanyak 13 tersangka dengan entitas Korporasi.
- Kelanjutan penanganan korporasi harus dituntaskan hingga tahap akhir.
- Terdapat 2 (Menteri) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Kinerja Penegak Hukum Tahun 2020

			
	259 kasus	170 kasus	15 kasus
	505 tersangka	295 tersangka	75 tersangka
	Rp17,5 triliun	Rp219 miliar	Rp805 miliar

Kejaksaan





Kuantitas Penanganan Kasus

- Kejaksaan memiliki kantor sebanyak 517 kantor dengan target penanganan kasus sebanyak 566 kasus. Anggaran yang dikelola sebesar Rp75,3 miliar.
- Kejaksaan sampai akhir tahun 2020 menangani sebanyak 259 kasus.
- Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan sekitar 46 persen atau masuk dalam kategori **C atau Cukup**

Kualitas Penanganan Kasus

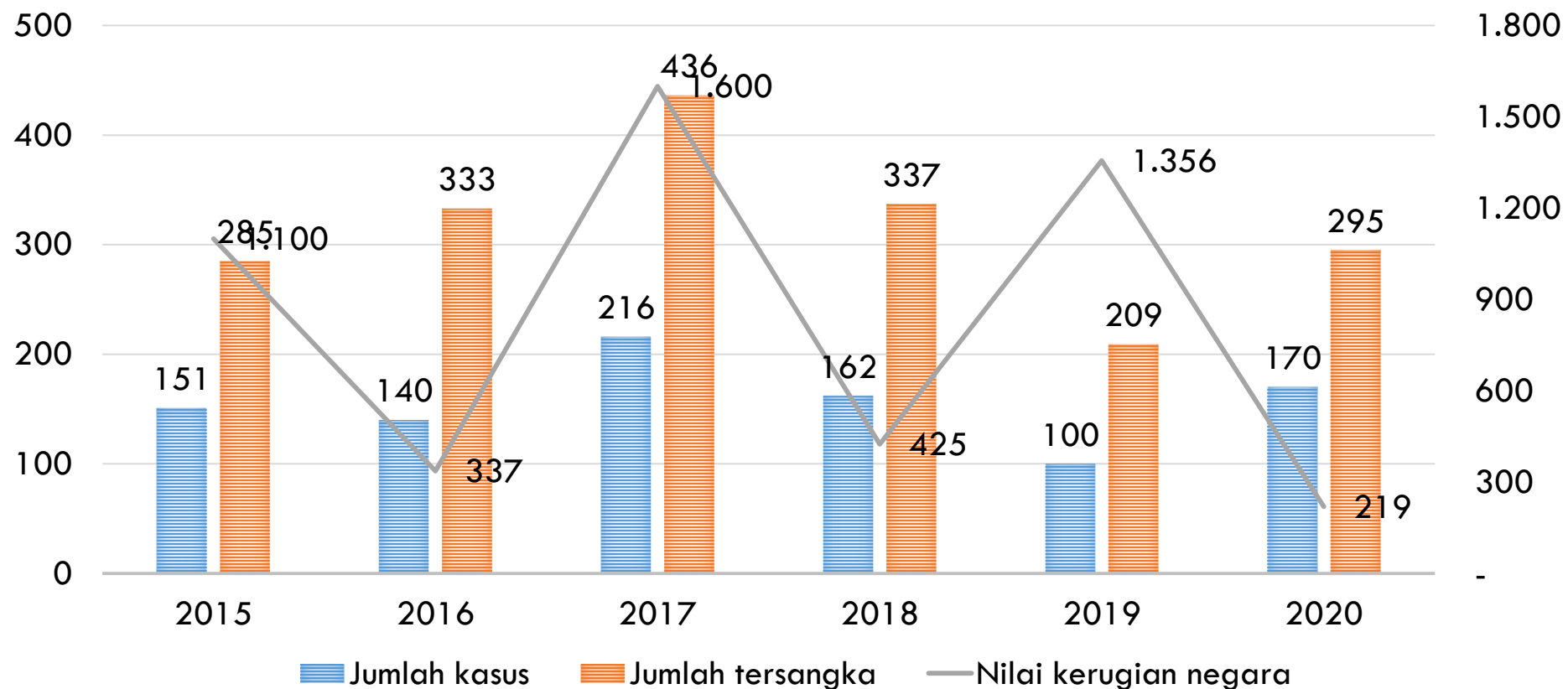
- Sebagian besar kasus yang ditangani oleh Kejaksaan merupakan kasus baru (222 kasus). Sementara pengembangan kasus sebanyak 34 kasus, dan OTT sebanyak 3 kasus.
- Kejaksaan paling sering menangani kasus korupsi yang terjadi di BUMN yakni sebanyak 16 kasus dari 22 kasus yang disidik oleh penegak hukum.



Profesionalisme Penindakan Kasus Korupsi

- Diduga terdapat sejumlah Kejaksaan yang tidak menangani kasus korupsi. Artinya, Kejaksaan Agung perlu melakukan evaluasi terhadap setiap Kejaksaan yang terbukti tidak bekerja.
- Kejaksaan Agung pada kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung diduga tidak independen dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Kepolisian





Kuantitas Penanganan Kasus

- Kepolisian memiliki 483 kantor. Target penanganan kasus korupsi sebanyak 1.539 kasus dengan anggaran sebesar Rp277 miliar.
- Kepolisian hanya dapat menangani 170 kasus. Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian sekitar 8 persen atau masuk dalam kategori **E atau Sangat Buruk**
- Tidak ditemukan adanya informasi mengenai penggunaan anggaran penyidikan kasus korupsi.

Kualitas Penanganan Kasus

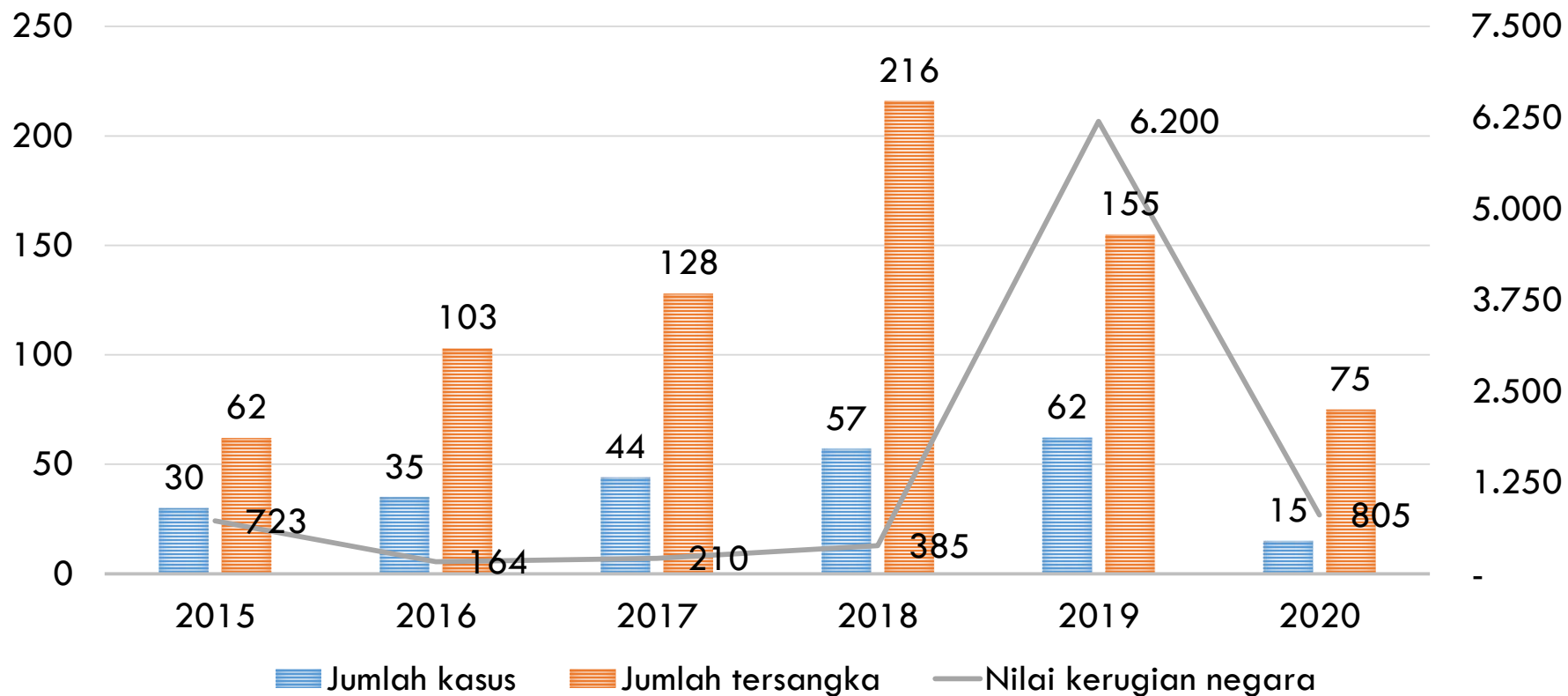
- Sebagian besar kasus yang ditangani oleh Kepolisian merupakan kasus baru (151 kasus). Sementara pengembangan kasus sebanyak 14 kasus, dan OTT sebanyak 5 kasus.
- Aktor yang paling banyak disidik adalah orang yang memiliki jabatan pada tingkat pelaksana. Hal ini diperparah dengan tidak adanya upaya untuk membongkar kasus pada aktor yang paling strategis.

Profesionalisme Penindakan Kasus Korupsi

- Kepolisian diduga memiliki konflik kepentingan pada saat menangani kasus dugaan korupsi penghapusan *red notice* di Interpol.
- Tidak jelasnya penanganan kasus korupsi terkait dengan penyelewengan dana Covid-19



Komisi Pemberantasan Korupsi





Kuantitas Penanganan Kasus

- Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK hanya sekitar 13 persen dari target sebanyak 120 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja KPK masuk dalam kategori **E atau Sangat Buruk**.

Kualitas Penanganan Kasus

- Sebagian besar penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK merupakan hasil OTT (7 kasus) dan pengembangan kasus (7 kasus). Sedangkan kasus yang baru disidik pada tahun 2020 hanya 1 (satu kasus).
- Lambatnya proses pengembangan kasus yang strategis untuk membongkar setiap aktor.



Profesionalisme Penindakan Kasus Korupsi

- Berdasarkan informasi dari situs web KPK terdapat sebanyak 149 kasus korupsi yang disidik, antara lain: 115 kasus perkara sisa tahun 2019 (*carry over*) dan 34 kasus lainnya disidik tahun 2020. Faktanya, ICW mencatat hanya 15 kasus yang disidik dengan tersangka sebanyak 75 orang.
- Kasus yang di-*carry over* diduga memiliki dua tujuan: 1). kasus korupsi akan dilanjutkan hingga tahap persidangan; 2). kasus korupsi berpotensi di SP3.
- Contoh kasus yang di-*carry over* dan di SP3 kan adalah kasus dugaan korupsi BLBI.
- Kebocoran surat perintah dalam beberapa kasus yang ditangani oleh KPK membuka ruang bagi pelaku untuk melarikan diri, menyembunyikan bukti, atau potensi intimidasi dan teror. Kebocoran berpotensi terjadi pada tingkat KPK ataupun Dewan Pengawas.



Kesimpulan

- Target penindakan kasus korupsi tahun 2020 oleh institusi penegak hukum sebanyak 2.225 kasus korupsi.
- ICW menemukan ada sebanyak 444 kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan dengan 875 tersangka korupsi. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp18,6 triliun.
- Kinerja penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum hanya mencapai 20 persen dan berada pada peringkat E.
- Kategori kasus yang terpantau oleh ICW adalah: a). kasus penyidikan: 374 kasus (84,2%); b). pengembangan kasus 55 kasus (12,4%), dan OTT: 15 kasus (3,4%)
- Modus korupsi seringkali terjadi pada saat proses pengadaan barang/jasa
- Narasi mengenai perampasan aset selama ini hanya gimmick. Sebab kasus yang masuk dalam proses penyidikan sebanyak 3 kasus. Selain itu, tidak masuknya RUU Perampasan Aset ke Prolegnas Nasional.
- Sektor yang paling banyak ditindak oleh institusi penegak hukum adalah anggaran desa. Institusi penegak hukum cenderung fokus pada kasus korupsi kecil.
- Aktor yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka adalah ASN dan swasta.



Kesimpulan

- Kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan cukup baik dalam aspek kuantitas. Sedangkan dalam aspek kualitas dan profesionalisme penanganan kasus cenderung buruk.
- Kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian sangat buruk dalam aspek kuantitas. Dalam aspek kualitas, aktor strategis jarang disasar dalam rangka pengembangan kasus. Sedangkan profesionalisme penanganan kasus cenderung buruk.
- Kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK sangat buruk pada aspek kuantitas. Dalam aspek kualitas, terdapat beberapa kasus yang prosesnya lambat. Sedangkan dalam konteks profesionalisme, terdapat dugaan bahwa kasus yang di-carry over akan di SP3 kan mengingat telah ada preseden atas kasus BLBI yang statusnya di-carry over.



Rekomendasi

- Institusi penegak hukum harus melaporkan pertanggungjawaban mengenai penggunaan anggaran untuk penyidikan kasus korupsi dan detail kasus yang masuk pada tahap penyidikan (deskripsi kasus, nama tersangka, nilai kerugian negara). Hal tersebut sejalan dengan mandat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Korupsi dalam sektor pengadaan barang/jasa perlu menjadi perhatian khusus bagi pemangku kepentingan. Sebab setiap proses dalam PBJ berpotensi menimbulkan kecurangan sehingga berimplikasi pada ruginya negara dan buruknya proyek yang dikerjakan.
- Pemerintah segera memprioritaskan agenda perampasan aset agar gagasan mengenai pemiskinan koruptor dan pengembalian kerugian negara dapat terealisasi.
- Penguatan kelembagaan Inspektorat penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korupsi di Pemerintah Daerah.
- Presiden sebagai Kepala Negara harus melakukan evaluasi terhadap kinerja dari setiap pimpinan institusi penegak hukum.
- Pemerintah perlu mempertimbangkan mengenai alokasi anggaran yang diberikan kepada institusi penegak hukum berdasarkan kinerja.

TERIMA KASIH

